

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin & Saebani, BA. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Akib, H. (2012). *Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1 (1).
- Alex, Heru. (2014). Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin (1986). Dalam <https://heru2273.blogspot.com/2014/12/model-implementasi-ripley-dan-franklin.html>. Diunduh pada 30 September pukul 07.44 WIB
- Anasiru, R. (2017). *Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Jurnal Sosio Konsepsia, 16(2).
- Anggriana, TM, & Dewi, NK (2016). *Identifikasi Masalah Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. Jurnal Ilmiah Psikologi, 7 (1).
- Chitrasari, N., Rahmawati, R., & Maisaroh, I. (2012). *Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Damayanti, W., & Adnan, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015*. Skripsi. Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan, 6 (03).
- Dewi, Safitri, (2022). *Dua PGOT Diamankan, Salah Satunya Hamil Delapan Bulan*. Solo: Timlonet
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. (2021). *Rencana Kerja (Renja) 2022*. DISSOSP3APPKB: Klaten
- Febriansyah. (2011). Model Implementasi Kebijakan Publik (Ripley & Franklin). Dalam <https://febriansyahtrainer1.wordpress.com/2011/05/10/model-implementasi-kebijakan-publik-ripley-franklin/>. Diunduh pada 30 September pukul 08.15 WIB
- Feis, I. (2017). *Implementasi Kebijakan Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf>. Diunduh pada 30 September pukul 07.50 WIB
- Gunawan, I., Hakim, K., & Aminudin, A. (2014). *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu*. Skripsi. Universitas Bengkulu

- Hakim, ML. (2020). *Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial: Tantangan dan Strateginya*. Malang: Inteligensia Media.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idrus, Z. (2018). *Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Malang*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang
- Insiyiroh, Inas Mufidatul. (2022). *Dinilai Resahkan Pengguna Jalan, Satpol PP & Damkar Klaten Tertibkan Pengamen Hingga Pengemis*. *Posjateng*. Dalam <https://www.posjateng.id/warta/dinilai-resahkan-pengguna-jalan-satpol-pp-damkar-klaten-tertibkan-pengamen-hingga-pengemis-b2f1d9e2c>. Diunduh pada 28 Juni pukul 19.40 WIB
- Kusnalia, D. (2014). *Profil Daerah Kabupaten Klaten Berbasis Multimedia*. *Skripsi*. STMIK Sinar Nusantara.
- Maftuhin, A., Jahidin, A., Torrido, A., Muflihati, A., Haq, M. I., Nazili, M., & Solechah, S. (2012). *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Samudra Biru.
- Moleong, LJ, & Edisi, PRRB (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. Zain Yaumil, Akbar. (2019). *Peran Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Gelandangan dan Pengemis (Studi Kasus Desa Grinting)*. *Skripsi*. *E-Journal UNDIP*.
- Pramono, Joko. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press
- Rama. (2022). *Langkah Hamenang Tekan Jumlah Gelandangan dan Pengemis*. Dalam <https://derapjuang.id/berita-terkini/langkah-hamenang-tekan-jumlah-gelandangan-dan-pengemis/>. Diunduh pada 28 November pukul 19.49 WIB
- Satpol PP. (2021). *Operasi Penertiban PGOT di Sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan Hingga Jalan Jogja-Solo*. Web Satpol PP Kabupaten Klaten
- Shofiyah, S. (2021). *Landasan teori: Konsep Implementasi*. IAIN Kediri
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Suharto, E. (2007). *Peta dan Dinamika Welfere State di Beberapa Negara Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?.* *Jurnal*

- Mandatori: Politik Kesejahteraan di Tanah Republik. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Supriyadi. (2022). *Tujuh PGOT di Klaten Diamankan Satpol PP, Salah Satunya Anak-Anak*. Klaten: Murianews
- Susanto, A. (2023). *Job Fair Klaten Diserbu Pencari Kerja*. Dalam <https://www.rri.co.id/daerah/407827/job-fair-klaten-diserbu-pencari-kerja>. Di unduh pada 30 November pukul 08.07 WIB
- Telaumbanua, D. (2018). *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96-96.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahab, S.A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wijayanti, D. P., & Kusdarini, E. (2022). *Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten*. *AGORA*, 11(4), 421-436.
- Yandip Prov Jateng. (2023, Maret). *Pansus Sukoharjo DPRD Kabupaten Klaten Studi Banding Mengenai Gelandangan dan Pengemis ke Pemkab Sukoharjo*. Semarang: Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Zefianningsih, BD, Wibhawa, B., & Rachim, HA (2016). *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3 (1).
- Perda Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 mengenai Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah